

Political Background, Transparansi Kebijakan Publik, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Made Asri Millifanny Aryastuti¹

I Dewa Nyoman Wiratmaja²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: millifanny9@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh *Political Background, Transparansi Kebijakan Publik Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung*. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 70 orang. Metode penentuan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *non probability sampling* dengan teknik sampling jenuh dengan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Political background, Transparansi kebijakan public dan Pengetahuan anggota DPRD berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah*. Mengacu dari temuan penelitian maka anggota DPRD hendaknya selalu menjaga *political baground, meningkatkan transparansi kebijakan publik dan meningkatkan pengetahuan tentang anggaran*.

Kata Kunci: *Political Background; Transparansi Kebijakan Publik; Pengetahuan Dewan; Pengawasan Keuangan Daerah*

Political Background, Transparency of Public Policy, Knowledge of the Council on Budgets and the Role of DPRD in Regional Financial Supervision (APBD)

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the influence of Political Background, Transparency of Public Policy and Knowledge of the Council on Budgets on the Role of DPRD in Regional Financial Supervision (APBD) of Badung Regency and Klungkung Regency. The population in this study were 70 people. The sampling method used in this study is a non-probability sampling method with a saturated sampling technique with multiple regression analysis techniques. The results showed that political background, transparency of public policies and knowledge of DPRD members had a positive effect on the role of DPRD in regional financial supervision and had a positive effect on DPRD's role in regional financial supervision. Referring to the research findings, DPRD members should always maintain the political background, increase public policy transparency and increase knowledge about the budget.

Keywords: *Political Background; Public Policy Transparency; Board Knowledge; Regional Financial Supervision*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 5
Denpasar, 26 Mei 2024
Hal. 1252-1264

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i05.p13

PENGUTIPAN:

Aryastuti, M. A. M., &
Wiratmaja, I. D. N. (2024).
Political Background, Transparansi Kebijakan Publik, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. E-Jurnal Akuntansi, 34(5), 1252-1264

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
10 Maret 2022
Artikel Diterima:
14 April 2022

PENDAHULUAN

Peran fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Klungkung dan Badung terhadap penggunaan anggaran adalah untuk mengetahui tujuan penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oleh sebab itu, peran pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Klungkung dan Badung terhadap anggaran pendapatan belanja daerah mencakup memantau, membuat laporan, dan melaksanakan tugas fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Winarna & Murni, 2007).

Menurut pendekatan behaviorisme, individu dianggap secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga politik yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang mengendalikan lembaga tersebut. *Political background* merupakan latar belakang dari pengalaman individu dalam berkecimpung di dunia politik. *Political background* ini meliputi pengalaman di DPRD, asal parpol koalisi, dan asal komisi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota DPRD diharuskan untuk mematuhi aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai komisi masing-masing. Perbedaan latar belakang politik sering menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat bahkan perselisihan antar anggota DPRD. Oleh karena itu, anggota DPRD harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Peranan anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat penting dan memiliki nilai yang strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup masyarakat banyak (Sayuti *et al.*, 2018). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa: (1) Pengawasan atas keuangan daerah dilakukan oleh dewan, (2) Serta adanya pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah oleh eksternal BPK. Berdasarkan penjelasan diatas maka aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran APBD. Oleh karena itu, diperlukan peran DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah APBD.

Kapabilitas yang baik harus dimiliki oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena sangat berpengaruh dalam Pengetahuan Anggaran Anggota DPRD terhadap Kapabilitas dalam Pengawasan Keuangan Daerah.

Karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh Dewan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka juga kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan- pengawasan keuangan Daerah akan semakin meningkat dan sangat berpengaruh. Apabila dalam tingkat pendidikan dan pengetahuan anggota DPRD rendah, maka juga kapabilitasnya juga rendah. Hal ini juga akan sangat berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dan perannya anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Kebaruan penelitian ini adalah adanya penambahan variabel transparansi kebijakan publik, yang dimana transparansi kebijakan publik adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Semakin seorang DPRD menerapkan atau melakukan keterbukaan tentang anggaran maka tidak ada pandangan buruk masyarakat terhadap anggaran tersebut, maka dari itu di penelitian ini menambahkan variabel transparansi kebijakan publik. Sehingga perlu ditelaah lebih dalam variabel-variabel yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian ini variabel yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah antara lain: *political background*, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai menurut (Dwi Cipta *et al.*, 2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa *political background* berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Menurut (Ilfan Bereki., 2020) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Menurut Ilfan Bereki., 2020 dalam penelitiannya membuktikan bahwa Transparansi Kebijakan Publik, berpengaruh positif terhadap hubungan pengetahuan dewan dengan pengawasan APBD.

Teori peran menyebutkan bahwa seorang individu dapat berperilaku sesuai dengan peran yang sedang dijalani. Setiap peran berhubungan dengan identitas yang menggambarkan individu tersebut dalam bertindak dalam suatu organisasi atau kelompok. Kaitannya dengan tugas seorang anggota dewan dalam mengawasi keuangan daerah, anggota dewan harus berperilaku sesuai dengan tanggungjawab dan tugas yang sedang dijalani. Artinya, anggota dewan harus berperilaku sesuai dengan tanggungjawab dan tugas yang sedang dijalankan. Dalam menjalankan tugasnya seorang anggota dewan dipengaruhi oleh *political background*. *Political background* tersebut meliputi: Pengalaman politik dan latar belakang partai politik. Semakin seorang anggota DPRD memiliki *political background* yang lebih baik maka pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah (APBD) akan semakin berkualitas dan baik.

Dalam beberapa penelitian (Dwi Cipta *et al.*, 2016) dan (Arianti *et al.*, 2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa *political background* berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

H₁: *Political Background* berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya hubungan yang terjadi antara prinsipal dan agen. Kaitannya dengan akuntansi sektor publik berarti masyarakat bertindak sebagai *principal* yang memberikan amanah kepada anggota dewan selaku *agent* untuk menjalankan tugasnya mengawasi keuangan daerah. Dalam pendekatan keagenan apabila dikaitkan dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah atau eksekutif merupakan agen dan DPRD atau legislatif merupakan prinsipal. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan keuangan daerah seorang anggota dewan harus melakukan keterbukaan informasi tentang anggaran yang jelas kepada masyarakat. Semakin seorang DPRD melakukan keterbukaan tentang anggaran yang diakses oleh masyarakat maka kinerja tersebut semakin maksimal.

Beberapa penelitian sebelumnya (Lambajang *et al.*, 2018) dan (Neltje *et al.*, 2021) dalam penelitiannya membuktikan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

H₂: Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

Berdasarkan pendekatan teori peran bahwa seorang individu dapat berperilaku sesuai dengan peran yang sedang dijalani. Kaitannya dengan tugas seorang anggota dewan, anggota dewan harus memahami perannya dalam hal ini peran yang dimaksud adalah tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawasan keuangan daerah (APBD). Untuk menjalankan tugasnya dalam mengawasi keuangan daerah dengan baik anggota dewan harus mengetahui mekanisme anggaran mulai dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata kelola keuangan daerah, proses penyusunan anggaran, sampai pada tahap pertanggungjawaban. Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat erat kaitannya dengan kinerja sebagai pengawasan keuangan daerah. Semakin luas pemahaman tentang anggaran oleh anggota dewan maka semakin baik pula kualitas kinerja anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dengan pengetahuan anggaran yang luas maka anggota dewan dapat mengontrol jalannya APBD dengan baik dan meminimalisir terjadi kecurangan.

Dalam penelitian sebelumnya yang menguji hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan peran anggota DPRD dalam mengawasi keuangan daerah (APBD), seperti yang dilakukan oleh (Hustianto., 2019); (Limbong *et al.*, 2020); (Dewi *et al.*, 2019) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

H₃: Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan pada kantor DPRD Kabupaten Klungkung Jl. Raya Besakih, Semarapura Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali dan pada kantor DPRD Kabupaten Badung Jl. Raya Sempidi, Sempidi, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung, Bali.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh komisi anggota DPRD Kabupaten Klungkung dan Badung. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung dan Badung jumlah

DPRD 70 orang. Metode penentuan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *non probability sampling* dengan teknik sampling jenuh.

Teknik analisis regresi berganda, yang dimana digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel-variabel independen *political background* (X1), transparansi kebijakan publik (X2), serta pengetahuan dewan tentang anggaran (X3) mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y). Bentuk persamaan umum regresi linier berganda:

$$Y = a + \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots \dots \dots (1)$$

Y = Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)

α = Konstanta

X1 = *Political background*

X2 = Transparansi kebijakan publik

X3 = Pengetahuan dewan dependen tentang anggaran

β = Koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Political Background (X ₁)	70	17	30	27.49	2.908
Transparansi Kebijakan Publik (X ₂)	70	19	35	31.96	3.424
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X ₃)	70	16	30	27.49	3.059
Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	70	19	30	27.64	2.632

Sumber: Data Penelitian, 2021

Variabel *political background* (X₁) yang terdiri dari 6 item pertanyaan dan diukur dengan skala 1-5, memiliki nilai minimum sebesar 17 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai mean rata-rata sebesar 27,49 dengan standar deviasi sebesar 2,908. Variabel transparansi kebijakan publik (X₂) yang terdiri dari 7 item pertanyaan dan diukur dengan skala 1-5, memiliki nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum sebesar 35. Nilai mean rata-rata sebesar 31,96 dengan standar deviasi sebesar 3,424. Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X₃) yang terdiri dari 6 item pertanyaan dan diukur dengan skala 1-5, memiliki nilai minimum sebesar 16 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai mean rata-rata sebesar 27,49 dengan standar deviasi sebesar 3,059. Variabel peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y) yang terdiri dari 6 item pertanyaan dan diukur dengan skala 1-5, memiliki nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai mean rata-rata sebesar 27,64 dengan standar deviasi sebesar 2,632.

Hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian ini disajikan dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i> B	<i>Standardized Coefficients</i> Std. eror	Beta	T	Sig
(CONSTANT)	5,692	2,111		2,696	0,009
Political Background (X ₁)	0,343	0,104	0,379	3,315	0,001
Transparansi Kebijakan Publik (X ₂)	0,196	0,096	0,256	2,043	0,045
Pengetahaun Dewan Tentang Anggaran (X ₃)	0,227	0,087	0,264	2,611	0,011
R Square	: 0,624				
Adjusted R Square	: 0,607				
F Statistik	: 36,488				
Signifikansi	: 0,000				

Sumber: Data Penelitian, 2021

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda menunjukkan nilai koefisien regresi dari variabel bebas (*political background*, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran) dan nilai konstanta variabel terikat (peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah), maka dapat diperoleh persamaan Regresi Linear Berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,692 + 0,343 X_1 + 0,196 X_2 + 0,227 X_3$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien *political background* (X₁) yaitu 0,343 memiliki arti bahwa *political background* memiliki hubungan positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Apabila *political background* (X₁) meningkat maka peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y) akan meningkat.

Nilai transparansi kebijakan publik (X₂) yaitu 0,196 memiliki arti bahwa transparansi kebijakan publik memiliki hubungan positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Apabila transparansi kebijakan publik (X₂) meningkat maka peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y) akan meningkat.

Nilai koefisien pengetahuan dewan tentang anggaran (X₃) yaitu 0,227 memiliki arti bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki hubungan positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Apabila pengetahuan dewan tentang anggaran (X₃) meningkat maka peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) (Y) akan meningkat.

Hasil uji koefisien determinasi dengan *adjusted R*² menunjukkan nilai dari *adjusted R*² adalah sebesar 0,607 atau 60%, dimana memiliki arti bahwa 60% variansi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dipengaruhi oleh variansi *political background*, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran, sedangkan sisanya sebesar 40% dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model penelitian ini, seperti variabel *personal background* yang pernah diteliti oleh (Yusra, 2018), variabel akuntabilitas publik oleh (Arianti *et al.*, 2017), dan variabel partisipasi masyarakat oleh (Nursanti, Masdar Mas'ud, 2019).

Hasil uji kelayakan model (uji F) yang disajikan pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 36,488 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansi pada uji F memiliki nilai lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh *political background*, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Tabel 2 menunjukkan bahwa *political background* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan t_{hitung} bernilai positif sebesar 3,315. Nilai signifikansi variabel sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 yang mengindikasikan bahwa H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa *political background* berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, *political background* anggota DPRD berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) yang mengartikan bahwa semakin tinggi *political background* yang dimiliki oleh DPRD, maka semakin baik pula peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah yang dilakukan. *Political background* yang tinggi dalam penelitian ini terjadi apabila anggota DPRD memiliki pengalaman yang cukup lama di partai politik, memiliki jabatan di partai politiknya, dan partai politik yang diikuti memberikan pengarahan tentang fungsi, tugas, dan tanggung jawab legislatif dengan baik dan benar. Seorang anggota dewan harus memiliki latar belakang politik yang baik agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat dilaksanakan secara optimal.

(Nursanti, Masdar Mas'ud, 2019); dan (Arianti *et al.*, 2017) meneliti pengaruh *political background* terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa *political background* berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Temuan penelitian dengan variabel yang sama dilakukan di Kabupaten Klungkung dan Badung dalam penelitian ini memberikan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya.

Maurice Duverger, (2010:102) berpendapat bahwa peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, peran berfungsi untuk membedakan perilaku dari orang yang menduduki posisi organisasi tertentu dan berfungsi untuk mempersatukan kelompok yang ada dalam organisasi dengan melengkapi spesialisasi dan fungsi koordinasi. Peran pada hakikatnya senantiasa mencakup serangkaian tindakan sosial yang di tugaskan kepada setiap individu dan kelompok dalam masyarakat, oleh karenanya perilaku seseorang itu bergantung pada faktor-faktor sosial, maka dari itu peran yang membentuk perilaku, dalam hal ini *political background* itu adalah peran dan pengawasan keuangan daerah merupakan perilaku. Artinya, perilaku pengawasan dipengaruhi oleh peran anggota DPRD yang terbentuk dari *political background* yang dimiliki oleh anggota dewan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa posisi anggota DPRD dengan salah satu tugasnya yaitu menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan daerah adalah sebuah peran, peran tersebut dibentuk dan dibangun oleh *political background* yang melatar belakangi seorang anggota DPRD. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah maka anggota DPRD harus senantiasa menjaga dan meningkatkan *political background*. Dalam perspektif yang lebih luas partai politik memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan calon anggota legislatif yang ikut dalam pemilu agar memiliki *political background* yang baik.

Tabel 2 menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045 dengan t_{hitung} bernilai positif sebesar 2,043. Nilai signifikansi variabel sebesar 0,045 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 yang mengindikasikan bahwa H_2 diterima. Hal ini berarti bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) yang mengartikan bahwa semakin tinggi keterbukaan informasi mengenai anggaran yang bisa diakses oleh masyarakat, maka semakin tinggi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Transparansi yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai ternyata sejalan dengan meningkatnya kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Keterbukaan kebijakan publik termasuk kebijakan anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat ternyata berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Lambajang *et al.*, 2018 dan Ilfan, dkk 2020 meneliti transparansi kebijakan publik terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah di Wilayah Sulawesi Utara, dan di Kabupaten Pulau Morotai. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Temuan penelitian dengan variabel yang sama dilakukan di Kabupaten Klungkung dan Badung dalam penelitian ini memberikan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya.

Jensen dan Meckling, (1976) mendefinisikan hubungan yang terjadi antara prinsipal dan agen. Tindakan agen akan terpenuhi harapan prinsipal apabila ada keterbukaan informasi mengenai anggaran. Untuk itu anggota DPRD yang bertindak selaku agen sebagai wakil dari masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal, akan lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD apabila terjadi keterbukaan informasi mengenai anggaran atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRD.

Temuan penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris berlakunya teori keagenan dalam peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hubungan anggota DPRD yang bertindak selaku agen sebagai wakil dari masyarakat yang bertindak sebagai prinsipal dapat terjadi dalam situasi keterbukaan informasi mengenai anggaran, terbukti bahwa semakin terbuka

informasi mengenai anggaran, maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD semakin tinggi.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011 dengan t_{hitung} bernilai positif sebesar 2,611. Nilai signifikansi variabel sebesar 0,011 lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 yang mengindikasikan bahwa H_3 diterima. Hal ini berarti pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) yang mengartikan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh anggota DPRD, maka semakin tinggi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Berpengaruhnya variabel ini sangat logis, karena dalam melaksanakan fungsinya dalam pengawasan keuangan daerah seorang anggota dewan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar mengenai anggaran. Pengetahuan ini diperoleh dari pendidikan dan pengalaman. Pendidikan disini merupakan latar belakang pendidikan anggota dewan yang berasal dari pendidikan ekonomi atau pendidikan yang mempunyai kaitan dengan anggaran pemerintahan.

Mandacan *et al.*, 2018 dan Dewi *et al.*, 2019, meneliti pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Labuhan Batu, dan pada Kabupaten Sidoarjo. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Temuan penelitian dengan variabel yang sama dilakukan di Kabupaten Klungkung dan Badung dalam penelitian ini memberikan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya.

Maurice Duverger, (2010:102) berpendapat bahwa peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, peran berfungsi untuk membedakan perilaku dari orang yang menduduki posisi organisasi tertentu dan berfungsi untuk mempersatukan kelompok yang ada dalam organisasi dengan melengkapi spesialisasi dan fungsi koordinasi. Pengetahuan dewan tentang anggaran erat kaitannya dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian seluruh anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca "anggaran" serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga seluruh anggota DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, anggota DPRD harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan yang cukup mengenai anggaran. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), maka anggota DPRD senantiasa harus meningkatkan pengetahuan yang dimiliki.

Implikasi teoritis dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengaplikasian teori peran dan teori keagenan, pengujian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang anggaran khususnya pada pengawasan keuangan daerah. Hal penting yang harus dimiliki oleh anggota dewan untuk meningkatkan kinerjanya pengawasan adalah *political background*, transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran. pada dasarnya anggota dewan terlibat secara keseluruhan dalam proses penganggaran. Dalam fungsi pengawasan keuangan daerah (APBD) pengetahuan dewan tentang anggaran sangat penting untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *political background*, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran merupakan variabel yang berpengaruh positif pada peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

SIMPULAN

Political background berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin positif *political background* anggota DPRD, maka semakin tinggi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi keterbukaan informasi anggota DPRD mengenai kebijakan publik, maka semakin tinggi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengetahuan anggota DPRD berpengaruh positif terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki anggota DPRD, maka semakin tinggi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *political background*, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran merupakan variabel yang berpengaruh positif pada peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), maka untuk itu bagi DPRD Kabupaten Klungkung dan Badung harus meningkatkan *political background* yang baik, selalu mengedepankan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan meningkatkan pengetahuan tentang anggaran.

REFERENSI

- Abdullah, S., Reza, M. K., Junita, A., & Meutia, T. (2020). Parliament Oversight on Local Government Financial Management an Empirical Evidence. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(3), 296–312.
<http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index%0AParliament>
Agung, U. D. (2020). *Fungsi pengawasan dprd dalam penetapan peraturan daerah apbd*

- di kantor dprd sumut. 5(32), 51–57.
- Andriyani, & Pramita, Y. D. (2010). Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (Apbd). *Naskah Publikasi*, 2, 1–21.
- Arianti, E., Nelly, R., & Supriono. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Political Background, Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi. *JOMFekom*, 4(1).
<https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Asnariza, A., Hamdiah, C., Sarboini, S., & Musriadi, M. (2020). *Accountability, Community Participation, And Transparency Of Public Policy Of Council Knowledge On Regional Budget And Financial Supervision (Case Study Of House Of Representatives Of Banda Aceh City)*. 105. <https://doi.org/10.4108/eai.17-10-2018.2294170>
- Ayunitha, A., Sulastri, H. W., Fauzi, M. I., Sakti, M. A. P., & ... (2020). Does the Good Corporate Governance Approach Affect Agency Cost. *Solid State Technology*, 63(4), 2–12.
https://www.researchgate.net/profile/Nugi_Nugraha2/publication/348755404_Solid_State_Technology_Volume_63_Issue_4_Publication_Year/links/600f3657a6fdccdb87edc4e/Solid-State-Technology-Volume-63-Issue-4-Publication-Year.pdf
- Chohan, Usman W. 2017. Legislative Oversight of Bureaucracy, in A. Farazmand (ed.). 2017. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*: 1-5. DOI 10.1007/978-3-319-31816-5_698-1
- Dewi, S. R., Sinduwiatno, K., & Biduri, S. (2019). Board of Knowledge about Budgeting Regional Financing (APBD) in Sidoarjo. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 2(2), 110–118.
<https://doi.org/10.33005/ebgc.v2i2.78>
- Hari Utomo. (2011). Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kota / Kabupaten dan DPRD Provinsi Jawa Tengah) SKRIPSI. *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Harmono, H., Manullang, S. O., Nugraha, K., Umar, J., Rachmawati, I., & Nurwanty, I. I. (2020). Analysis of Regional People’s Representative Council (DPRD) Comparative Study Activities in Efforts to Suppress Corruptive Behaviour. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(10), 226. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2150>
- Harnovinsah, Al-Hakim, Y., Erlina, & Muda, I. (2020). Effect of accountability, transparency and supervision on budget performance. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(Extra 7), 130–143.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4009622>
- Individu, B., Belakang, L., & Dan, P. (n.d.). *Sherly Dwi Cipta 1) , Zul Ammar 2) , Rina Andriani 3)*.
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3.

- Journal, I., & Budgeting, P. (n.d.). *International Journal Public Budgeting, Accounting and Finance Volume 4 Number 1, ISSN: 2655-6693*. 4(1).
- Kiranayanti, I., & Erawati, N. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1290–1318.
- Lambajang, A. A., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2018). Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 9(1), 104–117.
<https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.19630>
- Mahmud, U., & Maemunah, S. (2020). *OVERSIGHT OF THE DPRD ON THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATIONS ON THE CITY OF TANGERANG APBD*. 5(2).
- Mandacan, M. W., Sabijono, H., & Runtu, T. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota Dprd Terhadap Pengawasan Keuangan (Apbd) Daerah Di Kabupaten Manokwari. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 98–107.
<https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20025.2018>
- Munthali, George, N. C., & Xuelian, W. (2020). A new decade for social changes. *Technium Social Sciences Journal*, 6.
- Neltje, C., Rotinsulu, M., Nurnajamuddin, M., & Mas, M. (2021). *Open Access The Effect Of Budget Participation , Transparency and Internal Control on Accountability and Regional Financial Performance Banggai District*. 1, 296–304.
- Nursanti, Masdar Mas'ud, N. A. (2019). *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*. 2(4).
- Pengawasan, D., & Daerah, K. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 58–68. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v2i3.2520>
- Runtuwu, P. C. H., & Tussabaha, A. (2020). Performance of Legislative Budgeting Institutions on Government Institutions in North Maluku. *Asia Pacific Journal of Management and Education*, 3(3), 11–19.
<https://doi.org/10.32535/apjme.v3i3.962>
- Sari, D. U. (2016). Pengaruh Personal Background , Political Background Dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 44–52.
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28.
<https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- Sciences, P., Palembang, S. C., Sekip, S., & No, U. (n.d.). *M. Syuroh*. 20, 239–253.
- Tamaela, E. Y., Pattiasina, V., Dasinapa, M. B., Marani, Y., & Duri, J. A. (2020). Regional Financial Monitoring Models With Community Participation And Public Policy Transparency As Moderators. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(02), 4223–4232.
<https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i2/pr200745>
- Widajatun, V. W., & Kristiastuti, F. (2020). The Effect of Regional Financial

- Supervision, Accountability and Transparency of Regional Financial Management on Local Government Performance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(4), 2966–2974. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1319>
- Wijono, B. D. (2019). Analysis of Public Policy on the Shopping Budget and Regional Income of East Java Province (Study of Rpjmd of East Java Province 2014-2019 and Its Impact on Regional Budget). *Public Policy and Administration Research*, 9(4), 21–35. <https://doi.org/10.7176/ppar/9-4-04>
- Winarna, J., & Murni, S. (2007). Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.9 No.2(2), 136–152.
- Yusra, M. (2018). *Pengaruh Personal Blackground , Political Culture dan Sistem Pengelolaan Keuangan terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Bireuen*. 7(September), 35–42.